

## SINOPSIS

Terwujudnya *Good Governance* merupakan sebuah cita-cita luhur pemerintah di Negara manapun di dunia. Di Indonesia *Good Governance* setidaknya menjadi agenda besar reformasi tahun 1989. Adapun salah satu ciri *Good Governance* tersebut adalah Pemerintahan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang kependudukan khususnya program E-KTP. Program E-KTP yang dicanangkan oleh pemerintah sejatinya untuk melakuakn perbaikan sistem kependudukan dengan cara yang lebih modern (canggih). Program ini telah berjalan di seluruh Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul dalam program ini bila melihat fakta dilapangan sedikit tertinggal dengan daerah-daerah lain mengapa hal ini terjadi, ini lah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, sebenarnya bagaimana implementasi program E-KTP di Kabupaten Bantul tahun 2011-2012.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif guna mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program E-KTP di Kabupaten Bantul. Sumber-sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mendeskriptifkan data yang ada dengan tulisan atau rangkayan kata-kata, sistematis dan kemudian diinterpretasi atau ditafsirkan serta kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian di lapangan ternyata implementasi program E-KTP di Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011-2012 secara umum sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal seperti masalah sosialisasi yang perlu ditingkatkan serta kerusakan alat elektornik. Hal lain yang terungkap adalah program ini terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan sosialisasi dan perekaman database wajib KTP. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, komunikasi yang secara intens dan terarah atau tepat sasaran serta penempatan pegawai dan tim yang tepat sehingga kerja lebih efektif dan efisien. Faktor penghambatnya kerusakan pada alat elektronik perekam E-KTP, kerusakan sistem kelistrikan serta alokasi waktu yang kurang. Kesimpulan implementasi program E-KTP di Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik namun tetap ada kendala baik teknis maupun nonteknis serta belum tercapainya target yang maksimal

Saran yang dapat ditawarkan adalah melakukan sosialisai dan komunikasi yang lebih intens serta sistemik agar program ini benar-benar dipahami oleh masyarakat, membentuk tim komunikasi khusus daerah pedesan dan membuat sistem yang lebih muda apabila terjadi kerusakan pada alat perekam E-KTP.